

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Literasi keuangan (*Financial Literacy*) merupakan suatu keharusan bagi tiap individu agar terhindar dari masalah keuangan karena individu seringkali dihadapkan pada *trade off* yaitu situasi dimana seseorang harus mengorbankan salah satu kepentingan demi kepentingan lainnya. Menurut Robb dan Woodyard (2011) *financial literacy* yang cukup akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang, seperti mengatur atau mengalokasikan keuangannya dengan tepat. Menurut Soetiono (2018), Peran literasi menjadi sangat penting bagi kehidupan karena turut mempengaruhi perekonomian suatu Negara dalam hal pemanfaatan dan peningkatan sumber daya yang ada. Selama ini keberaksaraan (*literacy*) kerap didaulat menjadi kunci yang mampu membuka pintu bagi datangnya modernisasi, partisipasi, empati, demokratisasi, desentralisasi ilmu pengetahuan, perbaikan taraf hidup terutama ekonomi, serta kemajuan suatu bangsa.

Di Indonesia literasi keuangan telah menjadi salah satu focus kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan. Terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat cenderung kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengelola dan membuat keputusan keuangan dimasa yang akan datang. Dengan adanya perhatian khusus terhadap literasi keuangan ini diharapkan masyarakat lebih berpengetahuan, berkemampuan dan memiliki keterampilan dalam mengelola dan membuat keputusan keuangan dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kestabilan sistem keuangan dan dapat mengurangi kerentanan pada sistem keuangan di Indonesia (Soetiono, 2018).

Tingkat literasi yang tinggi akan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pengelolaan dan perencanaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan *saving behavior*. Penggunaan produk keuangan yang sederhana seperti tabungan, kredit dan asuransi akan membantu masyarakat dalam mengelola konsumsi dan meningkatkan investasinya, termasuk investasi di bidang pendidikan dan kesehatan (Lagarde, 2014). Dalam strategi nasional literasi keuangan Indonesia tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik (OJK, 2013a). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perencanaan keuangan adalah cara menjalani kehidupan saat ini sesuai dengan kemampuan keuangan (secara

sederhana) dan merancang kehidupan masa depan yang lebih sejahtera. Lemahnya tingkat literasi keuangan seseorang dan kurangnya pengetahuan akan pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada penggunaan layanan jasa keuangan, hal ini disebabkan karena adanya hambatan akses ke lembaga keuangan, sehingga ini akan mempermudah seseorang untuk dipengaruhi oleh penjual produk keuangan lain yang tidak termasuk dalam lembaga keuangan resmi. Hal tersebut tentunya dapat menghambat proses pembangunan perekonomian negara.

Tabel 1.1
Tingkat Literasi Keuangan Penduduk Indonesia 2013

NO	INDEKS LITERASI KEUANGAN	%
1	Well Literate	21,8%
2	Sufficient Literate	75,69%
3	Less Literate	2,06%
4	Not Literate	0,41%
	100	

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2013

Menurut Wibowo (2014) salah satu penyebab kurangnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu dikarenakan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2013), diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tergolong *well literate* yaitu hanya sebesar 21,84 %, *sufficient literate* sebesar 75,69%, *less literate* sebesar 2,06% dan *not literate* sebesar 0,41%, dengan tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan (inklusi) sebesar 76,19% pada tahun 2019.

Menurut laporan Bank Indonesia pada bulan Juli 2014 (www.bi.go.id) menyebutkan bahwa 49% dari masyarakat Indonesia sudah memiliki akses yang cukup baik terhadap lembaga keuangan, artinya hanya sebagian penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik terutama dalam sector perbankan. Namun hasil ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Negara Asia lainnya, seperti Malaysia misalnya, 65% dari total penduduknya, Singapura 98% dan Thailand 73%, India 55%, china 65%, Filipina 75% dan Pakistan 85%. Selain itu hampir 100% penduduk dari Malaysia dan Thailand memiliki akun di bank, sementara Indonesia hanya memiliki 41% (Muat,dkk,2014).

Berdasarkan angka indeks tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia dalam hal literasi keuangan masih rendah dan kurang dari separuh penduduk Indonesia belum mengakses produk dan jasa keuangan. Dalam hal ini pemerintah perlu berupaya untuk memupuk dan meningkatkan literasi keuangan (*financial literacy*) di dalam masyarakat.

Berdasarkan dilaksanakannya survei nasional pada pertengahan tahun 2013 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam menggunakan produk dan jasa keuangan adalah sebesar 21,8% (OJK, 2013b). Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2016 terjadi peningkatan indeks literasi keuangan menjadi 29,7%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan tersebut belum merata di setiap wilayah provinsi di Indonesia (OJK, 2017b). Tingkat literasi di wilayah Jawa dan Sumatera berada di atas tingkat literasi nasional, yaitu sebesar 37,2% dan 30,1%, diikuti dengan wilayah Bali Nusa Tenggara sebesar 29,0%, wilayah Kalimantan sebesar 27,4%, wilayah Sulawesi sebesar 26,1% dan wilayah Maluku, Papua sebesar 23,7%.

Survei nasional literasi keuangan 2013 dan 2016 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator tingkat literasi keuangan. Kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Survei 2016 menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi memiliki tingkat literasi sebesar 67,4%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang tidak sekolah, yaitu 3,6%. Kelompok masyarakat lulusan perguruan tinggi juga mempunyai jumlah responden dengan tingkat inklusi yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok lainnya, yaitu sebesar 88% (OJK, 2017b).

OJK juga telah mengadakan survey *Baseline* Portofolio Investasi UMKM rumah tangga, yang bertujuan untuk mengetahui pola dan perilaku investasi dan pembiayaan keuangan UMKM yang meliputi tingkat literasi keuangan, pendapatan dan faktor demografi. Secara umum, UMKM memiliki rasio asset keuangan di bawah 9%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan UMKM terhadap produk-produk keuangan masih relatif rendah. Ketika UMKM mengalami kesulitan keuangan dalam usaha sebanyak 26,4% UMKM cenderung meminjam kepada keluarga, teman, atasan, tetangga, atau arisan. Selanjutnya, sebanyak 14,7% responden memilih untuk memotong pengeluaran usaha ketika mengalami kesulitan keuangan dalam usaha. Hasil ini menunjukkan bahwa pilihan pinjaman ke bank masih relative kecil, yaitu 7%. Responden cenderung menggunakan cara pembiayaan informal ketika mengalami kesulitan keuangan (OJK, 2014).

Jenis kelamin diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Walaupun pelaku UMKM Perempuan di Indonesia sangat tinggi, namun tingkat literasi keuangan masih tetap didominasi oleh laki-laki. Sutrisno (2004) menjelaskan semua kegiatan perusahaan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk memakai dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Sutrisno tentang mengalokasikan dana secara efisien sangat penting dalam keberlanjutan perusahaan. Penyebab rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam membuat perencanaan anggaran dikarenakan pemikiran pelaku UMKM bahwa perencanaan anggaran tidaklah penting dan dapat diatur dengan mudah serta beranggapan bahwa tidak akan terjadi hal yang berbahaya terhadap perusahaan meskipun tidak melakukan perencanaan anggaran.

Terdapat beberapa masalah pada pelaku UMKM perempuan di Sumberbaru, diantaranya berkaitan dengan perilaku manajemen keuangan salah satunya permasalahan tentang *financial knowledge*. Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM ialah tidak mengetahui manfaat pengelolaan keuangan serta tidak dapat menyusun anggaran belanja.

Permasalahan dalam *financial skill* yang dialami para pelaku UMKM perempuan di Sumberbaru utamanya adalah dalam hal menyiapkan anggaran. Kebanyakan pelaku UMKM tidak pernah menyiapkan anggaran keuangan dalam manajemen usahanya dan tidak dapat memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Penyebab rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam membuat perencanaan anggaran dikarenakan oleh pemikiran pelaku UMKM bahwa perencanaan anggaran tidak penting dan dapat diatur dengan mudah dan tidak ada dampak buruk bagi keberlangsungan usaha mereka meskipun pelaku UMKM tidak melakukan perencanaan anggaran.

Pada *financial behavior* yang dialami pelaku UMKM perempuan di Sumberbaru adalah dalam hal kredit. Pengetahuan mengenai kredit para pelaku UMKM masih sangat rendah. Pelaku UMKM tidak begitu paham faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit, sehingga sulit bagi pelaku UMKM yang tidak melakukan berbagai pertimbangan saat mengajukan kredit, seperti pertimbangan tingkat bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Seharusnya para pelaku UMKM mampu mempertimbangkan berbagai hal pada saat akan mengajukan kredit agar dapat menggunakan kredit secara bijaksana.

Permasalahan dalam *financial attitude* yaitu masih masalah mengenai sikap keuangan yang dimiliki. Kebanyakan pelaku UMKM memiliki sikap yang buruk mengenai keuangan, hal tersebut ditandai dengan pemikiran yang mudah merasa puas dengan kinerja yang ada dan belum berfikir untuk melakukan peningkatan kemampuan dibidang manajemen keuangan karena sebagian pelaku usaha merasa kerjanya sudah cukup baik dan usahanya tetap berjalan dengan lancar dan tanpa

kendala meskipun pelaku UMKM tidak membuat perencanaan anggaran dan pengendalian terhadap keuangan. Sikap tersebut apabila dibiarkan akan membuat kinerja UMKM menurun dan tidak mampu bersaing secara kompetitif di pasar.

Secara umum kurangnya pengetahuan keuangan dalam hal keterampilan keuangan diatas diakibatkan oleh pendidikan. Pengetahuan keuangan dapat diperoleh dari pendidikan formal dan sumber-sumber informal. Pendidikan formal ini seperti program sekolah tinggi atau kuliah, seminar, dan kelas pelatihan di luar sekolah. Sedangkan sumber-umber informal dapat diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti dari orang tua, teman, dan rekan kerja, maupun yang berasal dari pengalaman sendiri.

Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM perempuan yang ada di pasar Sumberbaru. Lokasi pasar Sumberbaru ini berada di Jl. Krajan, Pringgowirawan , Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dengan kodepos 68156. Ketika pagi hari suasana pasar sumberbaru ini dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Jam operasional Pasar Sumberbaru ini yaitu jam 03.00-12.00. Perkembangan jumlah UMKM di unit Pasar Sumberbaru ini diharapkan mampu menopang perekonomian daerah. Akan tetapi kurang didukung dengan pengetahuan akan keuangan sehingga banyak UMKM yang dirasakan kurang maksimal karena rendahnya pengetahuan mengenai keuangan. Selain itu banyaknya UMKM yang sering melupakan pentingnya melakukan perencanaan keuangan dan pencatatan berupa laporan keuangan, pemasaran, kegiatan operasi dan transaksi menyebabkan pada perkembangan UMKM berjalan kurang baik dan kondisi UMKM perempuan diunit pasar sumberbaru baru masih memiliki keterbatasan dengan berbagai permasalahan baik kelembagaan usaha, maupun permodalan yang masih merupakan faktor pembatas ruang gerak UMKM. Dengan alasan tersebut maka hendaknya pelaku UMKM memiliki latar belakang pendidikan yang cukup sehingga mampu memahami pentingnya pengelolaan keuangan dengan baik.

1.2

Data jenis UMKM pada Pasar Sumberbaru Per November 2019

NO	JENIS USAHA	JUMLAH TOTAL	JUMLAH UMKM PEREMPUAN
1	Toko kue	2	2
2	Daging sapi	5	2
3	Daging ayam	7	4
4	Perancangan	22	18
5	Selep daging	2	1
6	Warung nasi	3	3

7	Sayur dan Buah	39	23
8	Koveksi	2	2
9	Pecah belah	4	1
10	Penjual ikan	7	2
11	Tahu & tempe	9	5
12	Toko emas	3	3
JUMLAH		105	66

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

Pada tabel diatas di ketahui jumlah total UMKM pada pasar Sumberbaru berjumlah 105 unit usaha, sedangkan jenis usaha pada Pasar Sumberbaru terdapat 12 jenis usaha. Sementara jumlah pemilik UMKM perempuan adalah 66 orang dan sisanya merupakan UMKM laki-laki. Dari semua jenis usaha yang ada, terdapat beberapa usaha yang sangat membutuhkan laporan keuangan, dan harus paham segala aspek dalam lingkup literasi keuangan. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus mendapatkan ilmu tentang literasi keuangan yang berguna untuk mengurangi resiko dalam usaha.

1.3

Tingkat Pendidikan UMKM Perempuan di Pasar Kecamatan Sumberbaru

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Perguruan Tinggi	2
SMA	29
SMP	24
SD	11
Jumlah Total	66

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

Pada tabel 1.3 diketahui bahwa semua pelaku UMKM Perempuan di Pasar Kecamatan Sumberbaru pernah bersekolah atau mengemban pendidikan. Untuk lulusan perguruan tinggi berjumlah 2, lulusan SMA berjumlah 29, lulusan SMP berjumlah 24, dan lulusan SD berjumlah 11. Jumlah Pelaku UMKM Perempuan di Pasar Sumberbaru berjumlah 66. Andrew dan Linawati (2014) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan keuangan seseorang akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terhadap pentingnya literasi keuangan yang harus dimiliki seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya para pelaku usaha seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penelitian ini penting dilakukan karena tingginya pelaku UMKM Perempuan di Indonesia tidak diimbangi dengan tingginya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM Perempuan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat literasi UMKM Perempuan di Pasar Kecamatan Sumberbaru.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menemukan fenomena di mana terdapat permasalahan yang di hadapi oleh pelaku UMKM perempuan di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember terutama dalam pengelolaan keuangan dan minimnya pengetahuan dalam mendapatkan akses permodalan sebagai salah satu cara untuk memajukan usaha yang dikelola maka akan dilakukan analisis mengenai tingkat literasi keuangan pelaku UMKM perempuan di pasar Kecamatan Sumberbaru , Kabupaten Jember.

Menurut pendapat para ahli (Kaly, Hudson dan Vush 2008) dalam penelitian Widyawati (2012) mengartikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep – konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan secara tepat ke dalam perilaku. Menurut lembaga menyatakan bahwa secara defenisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang.

Mengingat tingginya maka permasalahan yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah bagaimana tingkat literasi keuangan pelaku UMKM perempuan di pasar Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember berdasarkan *financial knowledge*, *financial skill*, *financial attitude*, *financial behaviour*, dan kinerja keuangan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaku UMKM jika memiliki pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidance*) dan keterampilan (*skill*) pada tingkat literasi keuangan perempuan pelaku UMKM di Kecamatan Sumberbaru.

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian dan saran dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dalam meningkatkan potensi maupun eksistensi para pelaku UMKM khususnya pelaku usaha perempuan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM perempuan dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan pemahaman akan literasi keuangan atau melek finansial.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya.

